



▶ ANGGARAN PEMBANGUNAN

Dana Desa Dipangkas, Layanan Tak Terdampak

WATES—Alokasi Dana Desa (ADD) di Kulonprogo berkurang Rp1 miliar akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran. Gelontoran anggaran dari Pemerintah Pusat yang biasanya mencapai Rp73 miliar, kini turun menjadi Rp72 miliar.

*Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com*

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kulonprogo, Muh Ihsan, mengatakan ADD dari Pusat digunakan untuk gaji pamong dan honor anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

DPMKP2KB mencatat rata-rata pengurangan ADD ini berdampak pada berkurangnya Dana Desa sekitar Rp20 juta untuk tiap kalurahan. Meski ada pengurangan anggaran, tidak ada dampak signifikan pada

▶ **Meski ada pengurangan anggaran, tidak ada dampak signifikan pada program dan layanan di 87 kalurahan**

▶ **Pemerintah kalurahan diarahkan untuk mengurangi anggaran lain bukan pada gaji dan honor.**

program dan layanan di 87 kalurahan yang ada di Bumi Binangun.

Ihsan menjelaskan jajarannya sudah menyosialisasikan pengurangan anggaran tersebut. Dalam praktiknya, gaji pamong dan honor BPKal tidak terdampak kebijakan tersebut karena pengurangan dilakukan untuk item pengeluaran lain.

Dia menyebut gaji pamong dan honor BPKal di Kulonprogo tetap seperti periode sebelumnya meski Dana Desa berkurang karena ADD terpotong. "Jadi, pemerintah kalurahan kami arahkan untuk mengurangi anggaran lain bukan pada gaji dan honor, pengurangannya juga tidak terlalu signifikan dampaknya," katanya saat ditemui, Selasa (11/3).

Pamong kalurahan di Kulonprogo,

menurut Ihsan, juga dapat menyesuaikan pengurangan anggaran itu. "Semuanya berjalan lancar dapat diatasi bersama dan tidak mengurangi program dan layanan di tiap kalurahan," katanya.

Kepala DPMKP2KB Kulonprogo, Muhti, menjelaskan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran lainnya adalah keterlambatan pencairan Dana Desa pada 2025. Di tahun sebelumnya, setiap Februari kalurahan sudah menerima Dana Desa. Kini, pencairannya mundur menjadi bulan Maret.

Berdasar pantauan, Muhti menyebut sejumlah kalurahan sudah menerima Dana Desa. "Pencarian dari Pusat langsung ke rekening pemerintah kalurahan, pantauan sementara ini sebagian sudah diterima pemerintah kalurahan," katanya.

Sedangkan pencairan Dana Desa tahap kedua dijadwalkan pada Mei 2025. Muhti menyebut dampak dari pengurangan anggaran ini membuat kalurahan harus mencermati ulang dan memprioritaskan pembangunan yang ada dengan harapan tidak berdampak signifikan pada rencana yang sudah disusun.